



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Tual

Hasna^{1*}, Andre Sapthu², William George M. Louhenapessy³

¹ Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Terapan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

³ Pascasarjana Ekonomi Terapan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

* Penulis korespondensi: ha5n4@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the impact of Locally-Generated Revenue (PAD) and transfer funds on capital expenditure in Tual City Government. The study employs an associative quantitative design using annual time-series data from 2010 to 2024 and multiple linear regression analysis. The estimation results indicate that PAD has a significant negative effect on capital expenditure, whereas transfer funds have a significant positive effect. The residuals are normally distributed, and the regression model shows no autocorrelation, heteroscedasticity, or multicollinearity. These findings indicate that an increase in local revenue does not automatically lead to higher capital expenditure when it is not accompanied by effective budget allocation. Meanwhile, transfer funds remain an important source of fiscal support for infrastructure development and public services. Therefore, the Tual City Government needs to optimize PAD collection, allocate transfer funds toward productive investments, strengthen budget planning, and periodically evaluate the effectiveness of capital expenditure to support sustainable regional development.*

Keywords: *Capital Expenditure; Fiscal Independence; Regional Own-Source Revenue; Transfer Funds; Tual City Government.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer terhadap belanja modal Pemerintah Kota Tual. Penelitian menggunakan desain kuantitatif asosiatif dengan data runtut waktu tahunan periode 2010–2024 dan analisis regresi linear berganda. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana transfer berpengaruh positif dan signifikan. Residual berdistribusi normal, sedangkan model regresi tidak mengalami autokorelasi, heteroskedastisitas, maupun multikolinearitas. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak secara otomatis meningkatkan belanja modal apabila tidak disertai alokasi anggaran dan prioritas belanja efektif. Sementara itu, dana transfer tetap menjadi sumber dukungan fiskal penting bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tual perlu mengoptimalkan penerimaan PAD, mengarahkan dana transfer pada investasi produktif, memperkuat perencanaan anggaran, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi belanja modal secara berkala untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Belanja Modal; Dana Transfer; Kemandirian Fiskal; Pendapatan Asli Daerah; Pemerintah Kota Tual.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (Nasution, 2023). Kemandirian fiskal menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana daerah mampu melaksanakan otonomi tersebut secara efektif. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan tonggak penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, efisien, dan berorientasi pada pelayanan public (Nurjaman, 2026). Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai

dengan potensi dan karakteristik khas masing-masing daerah. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri, yang mampu menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri dan mengelola keuangan publik secara efektif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan besarnya PAD yang berhasil dihimpun, tetapi juga mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan publik pada tingkat daerah (Inriani & Tamburaka, 2026). Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola potensi ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas fiskal (Latifa et al., 2025). Selain itu, alokasi anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor produktif, khususnya melalui belanja modal yang memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Konteks ini sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam pada daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal, seperti Kota Tual di Provinsi Maluku. Sebagai daerah otonom, Kota Tual memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan dana transfer yang efektif (Daga et al., 2023). Oleh karena itu, analisis kemandirian keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal daerah mampu mendukung tujuan desentralisasi dan pemerataan pembangunan daerah.

Menurut Khairani dan Mustika (2026) kemandirian keuangan daerah diukur berdasarkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemandirian fiskal daerah tersebut. Sebaliknya, apabila sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat, daerah tersebut dianggap bergantung dan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah. PAD sendiri terdiri atas komponen-komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal serta partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat (Handraini et al., 2024). Semakin tinggi PAD yang berhasil dihimpun, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan belanja modal yang ditujukan bagi penyediaan infrastruktur dan pelayanan public (Sulaeman & Silvia, 2019). Namun, dalam praktiknya, sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk Kota Tual,

masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan PAD karena terbatasnya basis pajak dan retribusi serta rendahnya efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada tahun 2024, PAD Kota Tual berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) mencapai Rp588.700.392.575, meningkat sebesar Rp19.652.910.575 atau 3,34%. Kemandirian fiskal merupakan salah satu tujuan utama otonomi daerah, ketika setiap pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya sendiri untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk melaksanakan otonomi secara penuh. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer kepada pemerintah daerah sebagai upaya mengatasi kesenjangan fiskal antardaerah dan menjamin pemerataan penyediaan pelayanan publik. Dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), berperan penting dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah.

Untuk Kota Tual, alokasi dana transfer pada tahun 2024 mencapai Rp524.978.917.000, meningkat sebesar 7,70% dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas Dana Desa (DD) sebesar Rp23.018.935.000 dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp5.756.023.000, sehingga dana transfer menjadi komponen terbesar pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar 92,06%.

Meskipun demikian, ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dapat menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah karena pemerintah daerah menjadi kurang terdorong untuk menggali potensi ekonomi lokal secara optimal (Pratama & Santioso, 2026). Dengan demikian, dana transfer memiliki hubungan yang ambivalen dengan kemandirian keuangan daerah: di satu sisi, dana transfer berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal dan penggerak pembangunan daerah; di sisi lain, dana transfer berpotensi melemahkan kemandirian fiskal apabila tidak disertai peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer sama-sama berperan penting dalam menentukan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, khususnya sebagaimana tercermin melalui belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap, seperti gedung, infrastruktur, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Tumboimbela et al., 2025). PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara efektif, sehingga memperluas ruang fiskal untuk investasi dalam bentuk belanja modal. Dengan

demikian, peningkatan PAD berkontribusi langsung terhadap kenaikan belanja modal karena daerah memiliki lebih banyak sumber pendanaan mandiri untuk membangun fasilitas publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai daerah otonom di Provinsi Maluku, Kota Tual memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor perikanan, pariwisata, dan jasa. Namun, dalam praktiknya, kota ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana PAD dan dana transfer berkontribusi terhadap peningkatan belanja modal di daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer terhadap belanja modal Pemerintah Kota Tual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sangat bergantung pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. PAD yang tinggi mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang baik, sedangkan dana transfer berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antardaerah. Namun, dalam praktiknya, sejauh mana kedua komponen tersebut memengaruhi peningkatan belanja modal Pemerintah Kota Tual masih belum jelas. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal Pemerintah Kota Tual, bagaimana pengaruh dana transfer terhadap belanja modal Pemerintah Kota Tual, serta sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer secara simultan memengaruhi belanja modal Pemerintah Kota Tual.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang berasal dari kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal (Kamala et al., 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD berperan penting dalam pembangunan daerah karena memungkinkan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan atau transfer pemerintah pusat. PAD yang memadai memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan,

mulai dari penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik hingga program-program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, peningkatan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal, sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PAD berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal daerah; semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Akmal et al., 2025). Penelitian terdahulu, seperti Wahyudi dan Nofianti (2025), menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal karena peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan, khususnya penyediaan infrastruktur publik. Dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan melaksanakan program sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber dayanya sendiri sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Singkatnya, PAD membantu daerah mencapai kemandirian keuangan yang lebih tinggi dan mendorong pembangunan yang lebih efektif bagi masyarakat.

Dana Transfer

Dana transfer merupakan instrumen keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dana transfer meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).

Dana transfer sangat penting bagi daerah yang memiliki kapasitas PAD rendah karena membantu menutupi keterbatasan fiskal dalam membiayai pengeluaran publik. Menurut Mardiasmo (2021), dana transfer berfungsi sebagai alat pemerataan fiskal dan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dapat mengurangi kemandirian fiskal daerah karena pemerintah daerah menjadi kurang terdorong untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lokal. Penelitian Sapthu (2023), menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif terhadap belanja modal, meskipun dalam beberapa kasus pengaruhnya lebih kecil dibandingkan PAD karena sebagian dana transfer sering dialokasikan untuk belanja operasional pemerintah daerah.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap, seperti tanah, peralatan, gedung, jalan, dan infrastruktur lain yang memberikan manfaat jangka panjang serta mendukung kegiatan pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan investasi pemerintah dalam pembangunan fisik yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Belanja modal berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2016). Oleh karena itu, besarnya belanja modal yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada kapasitas fiskal, khususnya yang bersumber dari PAD dan dana transfer.

Kerangka Konseptual

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Kemandirian keuangan daerah tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kebutuhan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai belanja modal yang digunakan bagi pembangunan sarana dan prasarana publik.

Di sisi lain, dana transfer dari pemerintah pusat juga berperan penting sebagai instrumen pemerataan fiskal untuk mendukung daerah dengan kapasitas PAD yang rendah. Melalui mekanisme transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah pusat membantu pemerintah daerah agar dapat mempertahankan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Dana transfer tersebut menyediakan tambahan sumber daya fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur daerah.

Oleh karena itu, PAD dan dana transfer sama-sama berkontribusi terhadap peningkatan belanja modal pemerintah daerah. PAD menunjukkan kemandirian fiskal daerah, sedangkan dana transfer mencerminkan dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Tual, hubungan kedua variabel tersebut penting untuk dianalisis karena masih terdapat kesenjangan antara kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.

3. METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antarvariabel yang dapat diukur secara numerik, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan belanja modal. Sifat asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku. Lokasi ini dipilih karena Kota Tual merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi terhadap dana transfer sehingga menarik untuk dianalisis pengaruh PAD dan dana transfer terhadap belanja modal. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menggunakan data sekunder periode 2010–2024.

Metode Estimasi

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh PAD dan dana transfer terhadap belanja modal Pemerintah Kota Tual. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Transfer

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

ε = Komponen galat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Hasil estimasi regresi linear berganda dengan belanja modal sebagai variabel dependen, serta PAD dan dana transfer sebagai variabel independen, menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 3955.577 - 0.097526 \text{ PAD} + 0.235088 \text{ DT} + \varepsilon$$

Probabilitas masing-masing parameter adalah PAD sebesar 0,0007, dana transfer (DT) sebesar 0,0000, dan konstanta sebesar 0,1276. Dengan tingkat signifikansi 5%, PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Konstanta tidak signifikan secara statistik.

Pengujian asumsi klasik diringkas sebagai berikut. Uji normalitas Jarque-Bera menghasilkan probabilitas 0,653601 ($> 0,05$), sehingga residual berdistribusi normal. Uji Breusch-Godfrey menghasilkan probabilitas Obs*R-kuadrat sebesar 0,0636 ($> 0,05$), sehingga tidak terdapat autokorelasi. Uji Glejser menghasilkan probabilitas Obs*R-kuadrat sebesar 0,1571 ($> 0,05$), sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas. Nilai VIF terpusat PAD dan dana transfer masing-masing sebesar 1,027661 (< 10), sehingga model tidak mengalami multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi seluruh asumsi klasik yang dipersyaratkan.

Pembahasan

Koefisien PAD sebesar -0,097526 dengan probabilitas 0,0007 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kota Tual. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD selama periode pengamatan belum secara otomatis diikuti peningkatan belanja modal. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila tambahan PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin atau belum dikelola secara efisien untuk mendukung pengeluaran produktif. Dengan demikian, besarnya PAD perlu diikuti perbaikan kualitas penganggaran, penetapan prioritas investasi publik, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya daerah.

Koefisien dana transfer sebesar 0,235088 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana transfer memberikan ruang fiskal tambahan bagi Pemerintah Kota Tual untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan fiskal pemerintah pusat bagi daerah dengan kapasitas PAD yang masih terbatas. Meskipun demikian, pemanfaatan dana transfer perlu diarahkan pada kegiatan produktif agar tidak memperkuat ketergantungan fiskal dan tetap mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Secara keseluruhan, PAD dan dana transfer merupakan dua sumber pembiayaan yang saling melengkapi. PAD mencerminkan kemampuan fiskal internal daerah, sedangkan dana transfer menyediakan dukungan eksternal untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan. Efektivitas keduanya dalam meningkatkan belanja modal sangat ditentukan

oleh kualitas tata kelola keuangan daerah, konsistensi perencanaan, serta ketepatan alokasi anggaran pada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kota Tual, sedangkan dana transfer berpengaruh positif dan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pendapatan daerah belum tentu meningkatkan belanja modal apabila tidak diikuti pengelolaan anggaran yang efektif. Sebaliknya, dana transfer masih menjadi sumber penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan infrastruktur daerah.

Saran

Pemerintah Kota Tual perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, sekaligus memastikan bahwa tambahan PAD diarahkan pada belanja produktif. Pengelolaan dana transfer perlu diprioritaskan untuk program pembangunan yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Selain itu, evaluasi berkala atas efektivitas belanja modal perlu dilakukan agar setiap alokasi anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, R., Khanifah, L. N., Novia, S., Putri, R., & Wahdatin, N. (2025). Analisis Kemandirian Fiskal dan Tantangan Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 458–471.
- Daga, R., Samad, A., & Mardana, A. (2023). *Smart Register, UMKM dan Pendapatan Asli Daerah*. Penerbit Adab.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 593–600.
- Inriani, A., & Tamburaka, S. (2026). ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN DANA APBD PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 25(9).
- Kamala, J., Salsa, S. A., & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7), 120–128.

- Khairani, A., & Mustika, N. (2026). PENGARUH KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BENGKULU. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 8(2), 133–144.
- Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(3), 411–417.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Nasution, E. Y. (2023). Pemberian Wewenang dan Otonomi Keuangan Daerah di Indonesia: Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Majelis*, 33.
- Nurjaman, A. (2026). *Otonomi daerah dalam perspektif teori dan praktik di Indonesia*. UMMPress.
- Pratama, N. S., & Santioso, L. (2026). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Fiskal, dan Belanja Daerah: Apakah Berperan Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah? *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 10(2), 149–161.
- Sapthu, A. (2023). LISTRIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU. *Jurnal Cita Ekonomika*, 17(2), 199–207.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan asli daerah, transfer daerah, dan belanja modal, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112.
- Tumboimbela, M. J., Wokas, H., & Kapojos, P. (2025). Analisis pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 190–199.
- Wahyudi, T., & Nofianti, N. (2025). Belanja modal dan pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia: Sebuah kajian sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 4(1), 22–46.